

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *public relations* Trans TV memiliki peran yang krusial dalam menghadapi dinamika dunia penyiaran, khususnya dalam merespons teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Di tengah tekanan eksternal yang kompleks dan ekspektasi tinggi dari regulator, *public relations* Trans TV tidak hanya menjadi perantara komunikasi, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam mempertahankan citra serta reputasi lembaga penyiaran tempat mereka bekerja. Mereka dituntut untuk tangguh, cepat tanggap, dan mampu menjaga profesionalisme saat menghadapi isu sensitif yang menyangkut kepatuhan terhadap regulasi.

Peran ini tercermin melalui berbagai tanggung jawab yang dijalankan, mulai dari menerima surat teguran, mengkomunikasikan isi teguran kepada pihak terkait secara internal, hingga berpartisipasi aktif dalam proses klarifikasi bersama tim produksi dan legal ke KPI. *Public relations* bertindak bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penyaring dan pengelola pesan agar informasi yang datang dari luar dapat diterima dengan akurat dan ditindaklanjuti secara tepat oleh unit kerja di dalam perusahaan. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa regulator ke dalam langkah operasional yang jelas menunjukkan bahwa *public relations* tidak hanya mengandalkan aspek teknis, tetapi juga pemikiran strategis.

Lebih dari sekedar pelaksana teknis yang hanya menjalankan fungsi komunikasi, *public relations* Trans TV terlibat aktif dalam proses analisis isi teguran KPI, memfasilitasi diskusi internal antar departemen, serta menjadi jembatan penting antara manajemen internal dan lembaga regulator. Dalam proses ini, *public relations* menunjukkan kapasitasnya sebagai pihak yang mampu menerjemahkan bahasa regulasi menjadi langkah strategis yang konkret. Teguran yang masuk tidak hanya ditanggapi secara administratif, tetapi dipahami sebagai masukan penting untuk menjaga kualitas tayangan dan keberlangsungan program.

Public relations pun turut terlibat dalam klarifikasi langsung di hadapan KPI, bersama tim produksi dan legal, yang mengindikasikan bahwa mereka bukan sekadar penyampai pesan, tetapi juga pengambil peran dalam penyelesaian masalah.

Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa *public relations* menjalankan beberapa peran sekaligus sebagaimana dikategorikan oleh Dozier dan Broom, yakni sebagai penasihat ahli (*expert prescriber*), fasilitator komunikasi (*communication facilitator*), fasilitator proses pemecahan masalah (*problem solving process facilitator*), dan teknisi komunikasi (*technician communication*). Keempat peran ini dijalankan sesuai dengan konteks dan kebutuhan situasional yang dihadapi, mulai dari menangani teknis penyusunan klarifikasi hingga memberikan pandangan strategis dalam pengambilan keputusan. Dengan menjalankan peran-peran tersebut secara fleksibel, *public relations* mampu menjembatani kepentingan eksternal dan internal secara seimbang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan *public relations* Trans TV dalam konteks ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan krisis, memainkan peran multidimensi yang mencakup teknis komunikasi, penanganan isu regulatif, hingga membangun dialog yang berkesinambungan dengan lembaga pengawas seperti KPI. Peranan mereka menegaskan bahwa fungsi *public relations* di industri media bukan hanya pelengkap, melainkan elemen vital dalam menjaga reputasi dan keberlangsungan organisasi penyiaran.

5.2 Saran

Melihat keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya berfokus pada satu studi kasus, yaitu peranan *public relations* Trans TV dalam merespons teguran dari KPI pada program Brownis, maka disarankan agar penelitian berikutnya bisa memperluas cakupan objek atau kasus. Penelitian lanjutan dapat membandingkan peranan *public relations* di beberapa stasiun televisi swasta nasional lainnya yang juga pernah menerima teguran dari KPI.

Kemudian, untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat meneliti peran *public relations* dalam konteks program siaran yang mengalami penghentian atau sanksi berat dari KPI, sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang batas peran *public relations* dalam kondisi krisis. Selain itu, peneliti selanjutnya bisa menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat bagaimana respon *public relations* berdampak terhadap persepsi publik di media sosial atau pemberitaan lainnya.

Untuk pihak Trans TV memperkuat serta mempertahankan pelatihan internal terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) secara berkala, tidak hanya bagi tim produksi tetapi juga seluruh elemen perusahaan termasuk tim kreatif dan penulis naskah. Hal ini penting guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang, terutama pada program-program *live* yang rawan terjadi improvisasi di luar naskah.

